



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS TENAGAKERJAKOPERASIDANUSAHAMIKRO
KOTA TANJUNGPINANG

DASAR HUKUM :

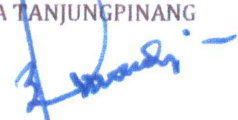
1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. Permenaker RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
3. Perda Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Perwako Tanjungpinang Nomor ... Tahun 202.. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETERKAITAN :

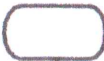
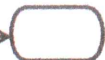
- SOP surat masuk
- SOP Validasi Pembayaran DKPTKA Perpanjangan
- SOP Tata Cara Pembayaran Kurang Bayar DKPTKA

PERINGATAN :

SOP tidak dilaksanakan jika berkas permohonan validasi tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku

NOMOR SOP	:	B / 569 / 7 / 5.11.02 / 2024
TGL PEMBUATAN	:	
TGL REVISI	:	10-12-2024
TGL EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG  H. EFENDI, S.Sos.,MM Pembina Utama Muda NIP. 196604041986021012
NAMA SOP	:	TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI - DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1. Memiliki kemampuan & kewenangan dalam Melakukan Validasi Pembayaran DKPTKA; 2. Menguasai prosedur & mekanisme Melakukan Validasi Pembayaran DKPTKA; 3. Memiliki Kompetensi di Bidang Penempatan TKA; 4. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer.		
PERALATAN / PERLENGKAPAN :		
1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer/laptop & kelengkapannya		
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
Disimpan sebagai Dokumen Arsip		

SOP TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI – DATA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)

NO	AKTIVITAS	WA	MUTU BAKU								KET	
			Bank	Petugas Validasi DKPTKA	Pengantar Kerja Ahli Muda	KABID PPTK	Kadisnaker	BPKAD	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Pihak Bank melakukan penetapan dan penyesuaian KURS IDR-USD terkait pembayaran DKPTKA, dan menginformasikan kepada WA								Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA	15 menit	Surat pemberitahuan pengembalian pembayaran retribusi	
2	Wajib Retribusi melakukan pengajuan permohonan pengembalian Retribusi DKPTKA secara tertulis secara offline atau online kepada Dinas			Ya					1. Surat Permohonan 2. Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA 3. Bukti pembayaran setoran DKPTKA dari Bank	15 menit	Berlas-berkas Permohonan, Tanda Terima Permohonan	
3	Petugas validasi menerima berkas permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan, apabila belum lengkap dihimbau kepada WR untuk melengkapinya.			Tidak					Berkas-berkas permohonan, aplikasi TKA-daerah.kemnaker.go.id	10 menit	Berkas-berkas Permohonan	
4	Petugas melakukan pendataan terkait pengembalian pembayaran retribusi dan kemudian diteruskan kepada Pengantar Kerja Ahli Muda								Berkas-berkas permohonan, aplikasi TKA-daerah.kemnaker.go.id	15 menit	Berkas-berkas Permohonan	
5	Pengantar Kerja Ahli Muda menelaah kemudian meneruskan kepada Kabid PPTK								Berkas-berkas permohonan, data pengembalian pembayaran DKPTKA	15 menit	Berkas-berkas Permohonan	
6	Kabid PPTK memerintahkan petugas pelayanan untuk melakukan pencetakan Surat keteetapan REtribusi Daerah Pengembalian Retribusi (SKRDPR) dituujuk kepada BPKAD								Berkas-berkas permohonan, data pengembalian pembayaran DKPTKA	10 menit	SKRDPR	
7	SKRDPR ditandatangani oleh Kadisnaker								SKRDPR	5 menit	SKRDPR	
8	SKRDPR diserahkan kepada BPKAD untuk ditidak lanjuti								Printout SKRDPR	10 menit	Printout SKRDPR	

Keterangan :



: Alur mulai dan berakhirnya proses



: Proses pengambilan keputusan



: Kegiatan (proses) yang dilakukan



: Alur proses